

KONSTRUKSI PELACUR DAN INDUSTRI SEKS DI MEDIA

Chory Angela Wijayanti
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Kristen Petra, Surabaya
choryangela@yahoo.com

Abstrak

Media adalah salah satu instrumen utama dalam membentuk konstruksi gender di masyarakat. Di Indonesia, citra relasi laki-laki dan perempuan dalam produk media masih mengusung nilai-nilai lama yang konservatif dan patriarki. Ketidakadilan gender dalam media ini semakin terasa saat perempuan dikaitkan dengan industri seks. Dengan adanya stereotip pada kelompok tertentu inilah yang menyebabkan potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat semakin meningkat. Penelitian ini kemudian melihat bagaimana media membentuk konstruksi tersebut, dalam peristiwa penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya, yang dinilai rawan konflik. Melalui metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough, dengan memfokuskan pada dimensi pertama, yaitu teks, hasil penelitian menunjukkan bahwa media membentuk representasi, relasi, dan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam realitas sosial tersebut. Program *talk show Primetime News* di Metro TV menggambarkan pelacur secara negatif. Selain itu, hubungan presenter dan pelacur digambarkan tidak setara. Hal ini terjadi saat presenter mengidentifikasi dirinya hanya sebagai presenter profesional yang bertugas untuk mewawancarai pelacur sebagai narasumber, namun tidak menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi dari informasi yang disampaikan oleh pelacur tersebut, bagi khalayak.

Kata kunci: Konstruksi, Realitas Sosial, Pelacur, Lokalisasi

Pendahuluan

Indonesia, adalah salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jumlah suku, bahasa, agama, dan budaya. Kemajemukan ini tentunya menjadi potensi yang strategis bagi kemajuan negara. Jika dijaga dengan kondisi yang tetap serasi dan berjalan harmonis, maka perbedaan ini akan menciptakan adanya integrasi sosial. Meski demikian, di sisi lain, kemajemukan ini juga dapat menjadi ancaman bagi adanya disintegrasi bangsa atau konflik sosial. Terciptanya konflik sosial sebenarnya juga akibat lunturnya sistem budaya asli sebagai akibat dari perubahan zaman, akulturasi, dan asimilasi. Hal ini memunculkan hilangnya rasa saling percaya, komunikasi antar warga, serta melemahnya kohesivitas sosial di dalam masyarakat. Salah satu gejalanya adalah ketika satu masyarakat memperlakukan persoalan intoleransi di lingkungannya sebagai masalah internal, bukan urusan publik, sehingga menyebabkan semakin rendahnya empati dan kepedulian terhadap persoalan minoritas.

Ignasius Wibowo menyebutkan bahwa negara tidak akan menjadi demokratis bila di dalamnya ada satu kutub yang terdiri atas kelompok superkaya, kelompok penikmat *privilege*, dan kutub lain yang terdiri atas kelompok minoritas yang tersingkirkan, kelompok orang miskin yang terpinggirkan. Demokrasi dibajak untuk kepentingan segelintir elite, penguasa, maupun bisnis (Wibowo, 2011, p.73-74). Hal ini menyebabkan nafas demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebebasan bagi tiap elemen masyarakat, tidak akan terwujud. Oleh karena itulah, diperlukan media massa, yang memiliki kemampuan mengendalikan pikiran masyarakat melalui informasi dan pengetahuan yang disampaikannya, sehingga gagasan, perilaku, dan kebijakan para pemimpin negara pun, tersampaikan ke masyarakat.

Menurut James Curran (1992, p.102), peran demokratis (*democratic role*) media dalam sebuah masyarakat, yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya peran media dalam kehidupan bernegara yang demokratis, sangat berkaitan dengan pembahasan tentang konsep ruang publik sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Jurgen Habermas. Di dalam ruang publik yang ideal, warga negara-tanpa tekanan apapun dan secara bebas, inklusif, dan egaliter- dapat memperbincangkan persoalan mereka dan membentuk opini bersama bagi kepentingan mereka.

Dalam pemberitaan konflik, media massa seringkali mengonstruksi realita sosial sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kebencian atau stereotip pada kelompok tertentu yang terlibat dalam konflik. Hal ini akan melekat dan laten dalam benak setiap orang, karena pemberitaan dengan kemampuan agenda medianya akan memaksa orang mengingat hal ini dan mengonstruksi dalam benak mereka sendiri akan sesuatu yang ada digambarkan dalam benaknya (McComb, 1994). Kondisi inilah yang semakin meningkatkan potensi terjadinya konflik sosial di kemudian hari. Padahal, diperlukan ruang dialog antarsuku, agama, ras, dan golongan sebagai suatu penciptaan atas kesadaran wacana kehidupan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara dalam rangka menghindari eksklusivitas.

Stereotip yang cukup banyak muncul di media adalah yang berhubungan dengan gender atau jenis kelamin, terutama pada perempuan. Di dalam ruang publik, kekerasan fisik dan psikologis terhadap wanita hingga kini juga masih mewarnai kehidupan karena relasi gender yang timpang. Dalam pemberitaan media, misalnya mengenai pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan, sering kita temukan bahasa-bahasa yang merendahkan derajat perempuan, dengan menonjolkan bagian-bagian tubuh perempuan secara mendetail. Pada gilirannya, bahasa telah ikut mengonstruksi perempuan dalam posisi sebagai “warganegara

kelas dua” (*the second class citizen*), atau dalam istilah Simone de Beauvoir, *The Second Sex* (Ibrahim, 2011, p.271).

Media adalah salah satu instrumen utama dalam membentuk konstruksi gender pada masyarakat. Media yang memiliki karakteristik dengan jangkauannya yang luas, bisa menjadi alat yang efektif dalam menyebarluaskan konstruksi gender kepada masyarakat. Di Indonesia, citra relasi laki-laki dan perempuan dalam produk media yang bermuatan pelecehan seksual bisa jadi masih mengusung nilai-nilai lama yang konservatif dan sangat patriarkhi. Akibatnya, dalam konstruksi realitas yang dibentuk media, terdapat ketidakadilan gender, yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, di antaranya marjinalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi, atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe, atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang, serta sosialisasi ideologi peran gender (Haryanto, 2009, p.167-183).

Ketidakadilan gender dalam media ini semakin terasa saat perempuan dikaitkan dengan industri seks. Salah satu penelitian dari *University of California*, yang dilakukan oleh Helga Kristin Hallgrimsdottir, Rachel Phillips, dan Cecilia Benoit (2006), memfokuskan pada stigma sosial dan narasi media terhadap industri seks yang ada di Victoria, Kanada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi media mereproduksi stigma sosial yang menunjukkan bahwa individu-individu dalam industri seks sebagai individu yang rusak secara moral, mental dan psikologis, serta melawan hukum. Konstruksi media ini sesuai dengan pendapat Dr. Kartini Kartono dalam bukunya “Patologi Sosial” (2014), yang menempatkan pelacuran sebagai salah satu dari lima jenis patologi sosial. Bersama dengan perjudian, korupsi, kriminalitas, dan *mental disorder*, pelacuran dianggap sebagai tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum (p.v).

Pelacuran atau prostitusi, biasanya berada pada satu tempat yang disebut *lokalisasi*, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah “lampu merah”, dimana umumnya terdiri atas rumah-rumah yang berlampu merah, yang dikelola oleh mucikari atau germo. (Kartono, 2014, p.253-254). Di Indonesia, terdapat satu lokalisasi yang disebut sebagai yang terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Dolly. Dalam lokalisasi yang terletak di Surabaya, Jawa Timur ini, setidaknya terdapat 9.000 lebih pekerja seks. Mereka tersebar di sekitar 800 wisma, kafe, dan panti pijat, yang berjejer rapi di kawasan prostitusi yang membentang kurang lebih sepanjang 500 meter itu (Merdeka, 2013).

Tidak heran jika kemudian hal-hal yang terkait dengan lokalisasi ini akan mengundang banyak perhatian dari masyarakat, baik nasional, maupun internasional.

Cemi Fitriani Jamal (2013), menyebutkan Dolly sebagai kawasan prostitusi yang telah memiliki kekuatan politik sendiri yang berdasar dari berbagai keuntungan yang di hasilkan. Mereka mengatur sendiri segala kebijakan yang berlaku untuk membentuk sistem kerja para pelaku prostitusi yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Kekuatan Dolly sebagian besar berasal dari keikutsertaan peran serta aparat militer yang dari tahun 1980-an telah mulai menguasai Dolly. Selain itu, berbagai keuntungan yang dihasilkan Dolly, terutama dari segi ekonomi, membuat banyak pihak memperebutkan wilayah ini. Dengan sedemikian banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya, tentunya akan menimbulkan kekhawatiran yang besar, saat kemudian pemerintah memunculkan keputusan untuk menutup lokalisasi ini. Kekhawatiran banyak pihak ini muncul terutama terkait dengan potensi terjadinya konflik saat rencana penutupan lokalisasi ini dilaksanakan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai potensi konflik horizontal maupun vertikal dapat terjadi karena adanya dugaan pelanggaran HAM dalam upaya penutupan Dolly. (Republika, 2014). Selain itu, FMKLS (Forum Komunikasi Masyarakat Lokalisasi Surabaya) juga menilai bahwa pemaksaan penutupan ini nantinya dapat menimbulkan potensi konflik mulai sosial, ekonomi, ketertiban, dan keamanan, karena banyaknya orang yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja dan membuka usaha di Dolly (Suara Mandiri, 2013). Di posisi berbeda, warga yang pro-penutupan Dolly dengan jumlah yang juga tidak sedikit, juga mengkhawatirkan terjadinya konflik horizontal. Meskipun menyetujui rencana pemerintah sebagai angin segar untuk memulai hidup baru di lingkungan yang bebas prostitusi, mereka tetap takut akan kemungkinan terjadinya konflik akibat adanya perbedaan pandangan terhadap penutupan ini (Tribunnews, 2014).

Adanya berbagai macam kepentingan yang menyebabkan munculnya potensi konflik sosial ini menarik perhatian media massa, baik cetak, elektronik, maupun *online*. Berbagai macam bentuk peliputan dilakukan untuk mengulas permasalahan ini. Salah satu bentuk tayangan televisi yang disiarkan untuk membahas penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak ini secara khusus adalah *Primetime News* di Metro TV. Program dalam format *talk show* ini menayangkan liputan dan pembahasan yang mendalam mengenai penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak tersebut, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang dinilai memiliki keterkaitan dengan isu tersebut. Dengan demikian, menarik jika kita teliti lebih lanjut, bagaimana konstruksi pelacur dan industri seks yang dibentuk oleh media tersebut.

Kerangka Teori

Bertolak dari paradigma sosiologi George Ritzer, kajian mengenai konstruksi realitas sosial ini mengakui manusia sebagai aktor yang kreatif dalam realitas sosialnya. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan sebagainya, yang kesemua itu tercakup dalam fakta sosial yaitu tindakan yang menggambarkan struktur dan pranata sosial. Realitas sosial, dilihat sebagai hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, dimana kebenarannya bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1991) menjelaskan lebih lanjut bahwa realitas sosial adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Dunia yang menurut George Simmel sebagai realitas yang berdiri sendiri di luar individu, yang menurut kesan kita bahwa realitas itu 'ada' dalam diri sendiri dan hukum yang menguasainya.

Max Weber melihat realitas sosial sebagai perilaku sosial yang memiliki makna subyektif, karena memiliki tujuan dan motivasi. Sementara Karl Marx, menilai bahwa kehidupan sosial budaya sebagai realitas sosial merupakan hasil pertentangan dua kelas yang terlibat dalam proses produksi (Bungin, 2007, p.12). Pada kenyataannya, realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di dalamnya maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial itu memiliki makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara subyektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara obyektif. Individu mengonstruksi realitas sosial, dan merekonstruksinya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan subyektivitas individu lain dalam institusi sosialnya.

Berger dan Luckmann menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Realitas sosial dijelaskan dengan memisahkan pemahaman 'kenyataan' dan 'pengetahuan'. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Berger dan Luckmann mengatakan intuisi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia, atau dengan kata lain terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat, dan masyarakat menciptakan individu.

Proses dialektika dalam membentuk makna atau memahami sebuah realitas dibagi atas tiga tahapan, yaitu proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Pertama, pada proses

eksternalisasi, setiap pelaku sosial akan menunjukkan gagasan dan pikiran yang mereka miliki ketika berinteraksi dengan pelaku sosial lainnya. Pelaku sosial akan menunjukkan makna subyektif yang mereka anut dalam memandang suatu realitas. Dalam hal ini, pelaku sosial melakukan penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Kedua, dalam tahap obyektivasi, gagasan yang merupakan realitas subyektif pelaku akan disampaikan pada pelaku sosial lainnya. Pada tahap ini gagasan akan diserap dan dinilai atau mengalami signifikansi, dan pemberian simbolisme terhadap benda yang disignifikansi, menjadi unsur penting yang digunakan dalam pembentukan realitas obyektif. Interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubyektif akan dilembagakan, atau mengalami institusionalisasi. Tahapan ketiga, yaitu internalisasi, realitas obyektif yang tertanam di dalam pelaku sosial akan disebar melalui proses sosialisasi kepada pelaku sosial lainnya. Pada tahap ini kembali realitas akan mengalami pemaknaan dalam kesadaran subyektifitas individu atau pelaku sosial lainnya. Proses sosialisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer, dialami individu pada masa kanak-kanak, yang dengan itu ia menjadi anggota masyarakat; dan sosialisasi sekunder, sebagai proses lanjutan yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan itu, ke dalam sektor-sektor baru dalam dunia obyektif masyarakatnya.

Sebagai sebuah kontruksi sosial, realitas yang terbentuk sebenarnya dapat bersifat subyektif maupun obyektif. Dikatakan subyektif, jika ia majemuk, yaitu ditentukan oleh makna, interpretasi, maupun interaksi subyektif individu dengan realitas itu sendiri. Di sisi lain, suatu realitas dapat dikatakan obyektif jika ia bersifat eksternal dan kursif, yang tidak dapat ditiadakan dengan angan-angan; berdasarkan perbedaan ini, proses dialektika yang dilakukan dalam konstruksi realitas oleh setiap pelaku sosial di setiap tahapan pembentukan makna, tidak akan selalu menghasilkan makna yang sama. Dalam memproduksi atau menerima makna suatu realitas, tiap pelaku sosial tidak harus bersikap obyektif, atau mengikuti perspektif pelaku sosial lainnya, namun ia dapat pula bersikap subyektif dengan mengikuti perspektif yang ada pada dirinya sendiri. Sehingga sesungguhnya, penerimaan atau penolakan makna merupakan hasil negosiasi subyektif di antara para pelaku sosial. Dengan kata lain, realitas selalu bersifat majemuk (tidak tunggal), dinamis (tidak statis), serta dialektis (tidak bersifat harga mati).

Konstruksi yang beragam atas realitas sosial ini, tidak jarang menciptakan potensi terjadinya konflik sosial, saat dalam hubungan antara dua pihak atau lebih, terdapat tujuan yang tidak kompatibel (Haryatmoko, 2014, 189). Hal ini kemudian menyebabkan masing-masing pihak menekan pihak lain untuk menghasilkan tujuan yang sama, hanya dengan

ancaman dan paksaan. Dalam konflik murni, pembatasan istilah dengan mencakup upaya atau ancaman untuk menggunakan paksaan akan sesuai. Tapi kita melihat bahwa dalam kenyataannya, hubungan sosial tidak pernah murni *zero sum*. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan cara-cara tanpa paksaan untuk mencapai tujuan yang tidak kompatibel dalam analisis konflik sosial. Hal ini menjadi penting karena keberadaan konflik sebagai stimulator penting dari perubahan sosial. Kompetisi, kerjasama, dan banyak proses sosial lainnya turut mendasari terciptanya perubahan sosial tersebut. Meski demikian, keberadaan konflik sangat penting dalam perubahan yang berkaitan dengan realokasi kekuasaan dan aturan tentang bagaimana keputusan kolektif dibuat. (Haryatmoko, 2014, p.189)

Dengan demikian, konflik dapat dinilai sebagai sebuah “opportunity”, dimana David Auggsburger (1992) memberikan empat asumsi sebagai berikut (dalam Martin & Nakayama, 2007, p.404) : (1) konflik adalah proses yang normal, dan berdayaguna; (2) semua isu yang muncul adalah subyek yang harus dirubah melalui proses negosiasi; (3) konfrontasi dan konsiliasi langsung sangat bernilai; dan (4) konflik adalah negosiasi ulang dari sebuah kontrak, yang memuat adanya distribusi ulang kesempatan, pelepasan ketegangan, serta pembaruan hubungan. Dalam buku yang sama, Canary, Cupach, dan Messman juga menyebutkan bahwa meskipun konflik adalah proses yang sulit, namun konflik memberikan kesempatan untuk memperkuat hubungan. Meskipun dalam orientasi pada konflik ini menemukan bahwa orang tidak menyenangi adanya konflik, namun orientasi ini menekankan pada aspek positif yang timbul melalui konflik tersebut. Ide utama dari orientasi ini adalah melihat konflik sebagai proses membangun (konstruktif), yang menghasilkan hubungan yang lebih kuat, sehat, dan memuaskan.

Media massa kemudian menjadi salah satu jalan untuk membentuk konstruksi realitas sosial di masyarakat. Pada perspektif konstruksi sosial, posisi media massa bersama segenap profesional media terlibat dalam menghadapi berbagai tahapan dalam proses konstruksi sosial. Dikatakan demikian karena media massa menerima suatu realitas yang terbentuk dari proses eksternalisasi oleh pelaku sosial dalam hal ini narasumber, melakukan interpretasi, signifikansi, maupun pemaknaan ulang terhadap realitas yang diterima, dan pada akhirnya mengonstruksi realitas yang akan diinternalisasikan oleh khalayaknya. Proses konstruksi ini memperlihatkan bahwa isi media massa merupakan realitas subyektif yang dikonstruksi oleh pihak komunikator, yang kemudian direkonstruksi kembali secara subyektif oleh media massa.

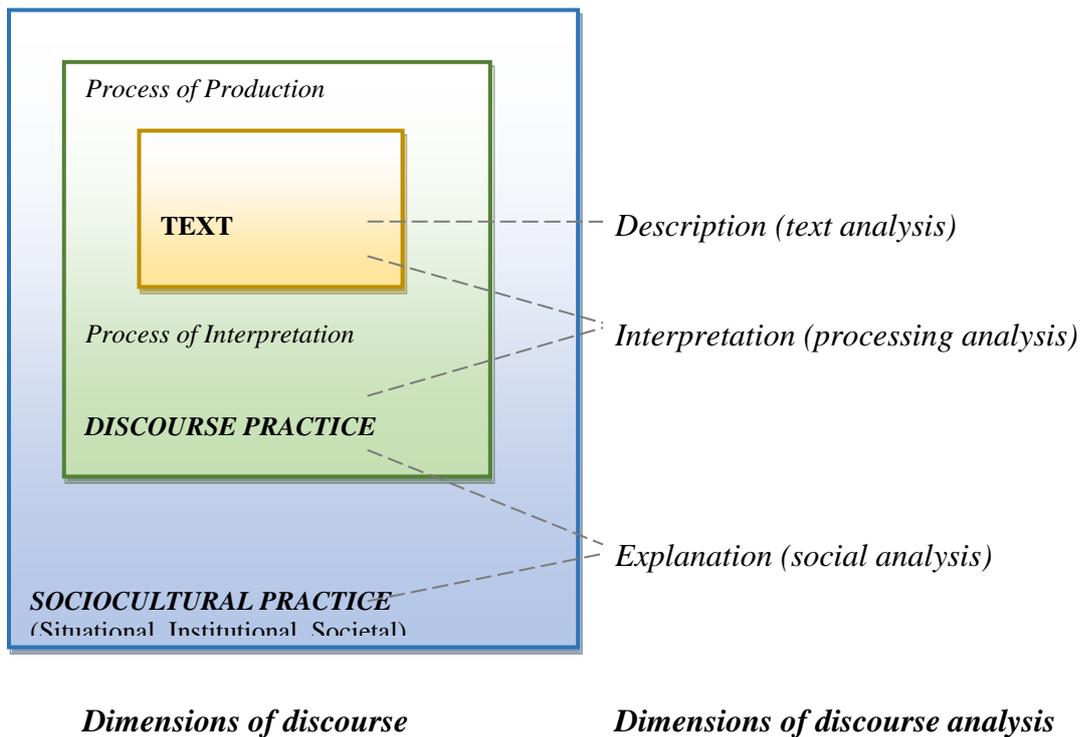
Dalam struktur komunikasi yang sudah sedemikian rupa, media telah diintervensi oleh pelbagai kepentingan, sehingga jelas tidak bisa bebas dari distorsi. Seluruh kerja jurnalistik, sebagai penugasan seorang wartawan/reporter, dalam rangkaian proses pencarian, pengumpulan, pemilihan, pemilahan, penulisan, penyuntingan, penempatan pada halaman/rubrik, bahkan hingga pemilihan tipografi, besar/jenis/warna huruf, dan akhirnya pemberitaan realitas sosial yang dipilih si wartawan, seluruhnya menjadi ajang konvergensi gelimangan pertarungan ideologi dan kepentingan yang sebenarnya dikonstruksi oleh hanya segelintir orang. Dalam hal ini, mereka adalah pemilik modal atau penguasa yang secara langsung atau tidak, berkepentingan untuk mengontrol perilaku linguistik media massanya (Ibrahim, 1998, p.xLii). Lebih dari itu, berita, teks, atau diskursus media yang hadir di hadapan khalayak pembaca bukanlah sesuatu yang berdiri netral-otonom pada dirinya. Ia menjadi realitas yang baru. Realitas yang sudah dipermak oleh rangkaian corak penyensoran yang tidak hanya muncul dari luar media, tapi juga bersemi di rahim pembuat berita itu sendiri. Secara khusus, Shoemaker dan Reese (1996, p.64) membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi isi media (*media content*). Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi proses konstruksi realitas sosial oleh media massa adalah (1) Ideologi, (2) Ekstra media, (3) Organisasi, (4) Rutinitas media, dan (5) Individu (pekerja media).

Metodologi

Analisis dalam penelitian ini menggunakan paradigma kritis, yang melihat bahwa realitas terbentuk melewati waktu dengan dipengaruhi oleh adanya faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan atau gender. Realitas ini kemudian membentuk rangkaian struktur yang pada masa kini dikenal sebagai apa yang “nyata”, yang natural dan abadi (Denzin & Lincoln, 1994, p.110-116). Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif, dimana menurut Denzin dan Lincon (1994) menyebutnya sebagai wilayah kajian multimetode, yang memfokuskan pada interpretasi dan pendekatan naturalistik bagi suatu persoalan. Kajian ini akan meliputi berbagai hal pengumpulan data lapangan, seperti *life history*, pengalaman pribadi, wawancara, pengamatan, sejarah, teks visual, dan sebagainya (Endaswara, 2006, p.86). Menurut Daymon, salah satu keunikan yang dimiliki pada penelitian kualitatif adalah analisis data tidak mengambil pada satu bagian saja misalnya penulisan dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan. Akan tetapi, analisis berlangsung secara kontinu, terus menerus, dan menjadi proses yang sistematis berjalan berbarengan dengan pengumpulan data (Daymon, 2001, p.232).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis wacana kritis yang akan menghubungkan teks dan konteks untuk melihat tujuan dan praktik bahasa. Pendekatan perubahan sosial akan digunakan sebagai kerangka analisis penelitian ini dengan mengambil pemikiran dari Norman Fairclough, yang menghubungkan antara teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Model analisis wacana ini mengkombinasikan tradisi analisis tekstual, yang selalu melihat bahasa dalam ruang tertutup, dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Titik perhatiannya adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu melalui analisis yang menyeluruh. Bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan, dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu (Eriyanto, 2001, p.285-334).

Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yang secara sederhana, kerangka analisisnya tergambar dalam gambar di bawah ini :



Gambar 3.1 Kerangka Analisis Wacana Norman Fairclough

Sumber : Fairclough, 2010, p.133

Penelitian ini hanya menggunakan dimensi pertama saja, yaitu teks, yang melihat bahwa teks bukan hanya menunjukkan bagaimana suatu obyek digambarkan tetapi juga bagaimana hubungan antar onyek didefinisikan. Terdapat tiga elemen dasar yang perlu dianalisis dalam teks, yaitu :

- (1) Representasi, bagaimana seseorang, kelompok, tindakan, kegiatan, ditampilkan dalam teks. Representasi dalam pengertian Fairclough dilihat dari hal, yaitu bagaimana seseorang, kelompok, dan gagasan, ditampilkan dalam anak kalimat dan gabungan atau rangkaian antarak kalimat. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana penggambaran individu, kelompok, peristiwa, maupun asumsi yang terkait dengan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak melalui penggunaan dan kombinasi antar kalimat yang “hadir” (*presences*) dalam teks. Selain itu, “ketidakhadiran” (*absences*) dalam teks juga penting untuk dianalisis.
- (2) Relasi, berhubungan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Media di sini dipandang sebagai arena sosial, di mana semua kelompok, golongan, dan khalayak yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan versi pendapat dan gagasannya. Paling tidak menurut Fairclough, ada tiga kategori partisipan utama dalam media : wartawan, khalayak media, dan partisipan publik. Dengan demikian, titik perhatian dari analisis hubungan adalah bagaimana pola hubungan di antara ketiga aktor tadi ditampilkan dalam teks. Analisis hubungan ini penting dalam dua hal : pertama, untuk melihat bagaimana kekuatan-kekuatan sosial ini ditampilkan dalam teks. Kelompok yang mempunyai posisi lebih tinggi, umumnya ditempatkan lebih tinggi dalam hubungan dengan wartawan dibanding dengan kelompok minoritas; dan kedua, analisis hubungan juga penting untuk melihat bagaimana khalayak hendak ditempatkan dalam pemberitaan. Bagaimana pola hubungan antara wartawan dengan partisipan lain itu ingin dikomunikasikan kepada khalayak. Atau dengan kata lain, bagaimana teks itu membangun relasi antara khalayak dengan partisipan sosial yang dibangun.
- (3) Identitas, bagaimana identitas wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks pemberitaan. Yang menarik, menurut Fairclough, adalah bagaimana wartawan menempatkan dan mengidentifikasi dirinya dengan masalah atau kelompok sosial yang terlibat. Selain itu, identitas itu bukan hanya dilekatkan dan berkaitan dengan wartawan, tetapi juga bagaimana partisipan publik tersebut diidentifikasi, dan bagaimana juga khalayak diidentifikasi.

Analisis Hasil Penelitian

Wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa. Bagaimana media menyajikan suatu isu, akan menentukan bagaimana khalayak memahami atau mengerti suatu isu. Wacana media adalah saluran individu mengonstruksi makna, dan pendapat umum adalah bagian dari proses melalui mana wartawan dan pekerja media membangun dan mengonstruksi realitas yang akan disajikannya ke dalam berita.

Bagaimana media menempatkan, mempersepsi, mengidentifikasi, dan memberi label peristiwa dalam pemahaman tertentu inilah yang disebut sebagai bingkai (*frame*) berita. Melalui proses konstruksi, *frame* menyediakan sebuah cerita yang membantu khalayak menafsirkan realitas serta menempatkan cerita tersebut dalam proses tertentu, sebagai masalah bersama, dan bukan masalah individu. *Frame* akan membentuk kesadaran dan tindakan bersama khalayak, termasuk mengenai apa cara yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Seperti halnya dalam penelitian ini, tayangan *Primetime News* menjadi wacana penting untuk memahami peristiwa penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya. Banyaknya pihak yang terlibat dan terkait dengan proses penutupan tersebut, mengundang banyak kepentingan masuk ke dalamnya. Dengan sedemikian banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya, memunculkan kekhawatiran besar akan potensi terjadinya konflik, saat rencana penutupan lokalisasi ini dilaksanakan.

Peneliti menggunakan analisis framing milik Gamson dan Modigliani, untuk melihat bagaimana media, dalam hal ini Metro TV melalui program *Primetime News*, menempatkan, mempersepsi, mengidentifikasi, dan memberi label terhadap peristiwa penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak ini. Dengan menggunakan metode analisis *framing* milik Gamson dan Modigliani, peneliti mengelompokkan temuan-temuan data dalam teks, dengan memakai dua perangkat wacana, yaitu perangkat pembingkai (*framing devices*) dan perangkat penalaran (*reasoning devices*), yang nampak pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1. Tabel Perangkat Pembingkai (*Framing Devices*)

FRAMING DEVICES	
Methapors	Exemplar
<ul style="list-style-type: none"> • Penutupan Lokalisasi oleh pemerintah kota Surabaya akan menjadi seperti waduk yang air bahnnya keluar kemana-mana • Lokalisasi menjadi <i>safe belt</i> yang menjaga penyakit seks menular tidak menyebar 	<p>Pekerjaan sebagai PSK tidak sebanding dengan PNS</p>
Catchphrases	Depiction
<p>Lokalisasi merupakan tempat untuk mengais rejeki</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang hidup di sekitar lokalisasi sebagai rakyat kecil yang kehidupannya harus diselamatkan • Wanita di lokalisasi merupakan pekerja yang mencari keuntungan ekonomi • Dengan stigma sebagai PSK, penghibur, akan mempersulit dalam mendapatkan pekerjaan • Terdapat judgement kurang positif dari masyarakat terhadap PSK
Visual Images	
<ul style="list-style-type: none"> • Presenter menanyakan besar penghasilan PSK : 	<ul style="list-style-type: none"> • Khofifah menganggap lokalisasi sebagai <i>safe belt</i>, yang jika ditutup akan mengakibatkan tersebarnya penyakit seks menular: 
<ul style="list-style-type: none"> • Presenter menyetujui pernyataan Khofifah bahwa terdapat judgment kurang positif terhadap PSK : 	

Tabel 2. Tabel Perangkat Penalaran (*Reasoning Devices*)

REASONING DEVICES	
Roots	Appeals to Principle
Ekonomi dan pendidikan menjadi latar belakang menjadi PSK	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan lokalisasi di kota besar, terutama pelabuhan, merupakan sebuah kewajaran • Tidak ada jaminan bagi para PSK untuk bisa mendapat pekerjaan
Concequences	-
Bantuan modal dan kompensasi tidak cukup membantu memperbaiki kehidupan PSK	-

Temuan-temuan data ini kemudian peneliti rangkum sehingga kemudian dapat dirumuskan bagaimana media mengonstruksi peristiwa tersebut, bagaimana cara pandang atau perspektif yang digunakan itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana peristiwa penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak tersebut.

Selain itu, merujuk pada metode analisis wacana kritis yang disampaikan oleh Fairclough, analisis *framing* ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan elemen dasar pertama pada tingkatan tekstual, yaitu **representasi**. Representasi pada dasarnya ingin melihat bagaimana seseorang, kelompok, tindakan, kegiatan digambarkan atau ditampilkan melalui anak kalimat, gabungan anak kalimat, atau rangkaian antaranak kalimat. Representasi yang muncul dalam teks adalah sebagai berikut :

Pertama, keberadaan lokalisasi dianggap sebagai hal yang lumrah. Seperti yang terlihat dalam kalimat yang disampaikan oleh Thamrin, aktivitas dalam lokalisasi ini terepresentasikan sebagai sebuah proses mental berupa fenomena, yaitu gejala umum, yang membentuk kesadaran khalayak, tanpa menunjuk subjek/pelaku, dan korban secara spesifik. Hal ini muncul dalam kalimat “beroperasinya bisnis prostitusi menjadi sesuatu yang hampir dalam tanda kutip menjadi terjadi dimana-dimana”. Dengan demikian keberadaan aktivitas prostitusi yang terdapat dalam lokalisasi, dianggap merupakan hal yang biasa terjadi di dalam masyarakat.

Pada perangkat *appeals to principle* terlihat sebuah klaim moral sebagai argumentasi pembenar pernyataan yang muncul di media. Dalam teks ini, klaim moral yang muncul adalah

mengenai keberadaan lokalisasi di kota besar, terutama pelabuhan, sebagai sebuah kewajaran atau hal yang lumrah terjadi. Argumentasi ini muncul dari pernyataan Thamrin berikut ini:

Ya kalau kita lihat satu-satu ya kita tahu bahwa Surabaya itu adalah kota pelabuhan dan perdagangan terbesar di Indonesia. Nah di kota besar apalagi kota pelabuhan itu itu beroperasinya bisnis prostitusi menjadi sesuatu yang hampir dalam tanda kutip menjadi terjadi dimana-dimana sehingga mendekati kata lumrah. Walaupun tidak dibenarkan secara moral tidak dibenarkan secara agama, tapi itu terjadi. Nah kemudian sejak jaman kolonial Belanda sampai sekarang, berarti sudah terbangun suatu wujud kehidupan yang sudah sangat mapan. Itu pemukiman yang sudah sangat mapan dengan berbagai macam jaringan ekonomi sosial dan budaya yang juga ada di situ.

Dari pernyataan Thamrin tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan lokalisasi merupakan hal yang biasa terjadi di sebuah kota besar, terlebih yang memiliki pelabuhan, seperti kota Surabaya. Konon, pertumbuhan sebuah kota selalu diawali dengan pelacuran (Purnomo, 1982, p.8). Konon singgahnya para pelaut bahari bukan untuk urusan bisnis saja, tetapi juga mencari pengalaman seksual di daerah yang disinggahnya. Makin asyik pengalaman yang diperoleh, makin sering pula para pelaut singgah. Sehingga kemudian menumbuhkan suatu kota dengan segala perlengkapannya.

Selain itu, lokalisasi dianalogikan sebagai “waduk” atau “safe belt” yang menampung keberadaan penyakit-penyakit menular seksual, agar tidak menyebar ke masyarakat. Hal ini nampak dalam perangkat *metaphors* yang muncul dalam kalimat yang disampaikan oleh Thamrin berikut ini :

Kalau ini Dolly ditutup maka itu seperti waduk itu air bahnya keluar kemana-mana mbleber kemana-mana, ke jalan-jalan, ke kafe-kafe, ke hotel-hotel, satu jam dua jam, ke tempat-tempat pijat, dan sebagainya (baris 50-53).

Yang menjadi kunci utama dari perangkat ini adalah penggunaan kata kiasan untuk memperkuat pesan utama dalam teks. Dari kalimat di atas, tampak bahwa Thamrin menganalogikan lokalisasi sebagai sebuah ‘waduk’.

Kedua, PSK digambarkan secara negatif sebagai pekerja kelas bawah yang hanya mencari keuntungan secara ekonomi, dan tidak memberikan komitmen penuh untuk mengikuti sosialisasi maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Melalui perangkat *depiction*, fakta dalam teks digambarkan dengan memakai kata, istilah, kalimat konotatif, agar khalayak terarah pada citra PSK sebagai seorang pekerja yang mencari keuntungan secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan pada perangkat *catchphrases*,

dimana PSK melihat lokalisasi sebagai tempat untuk ‘mengais rejeki’ atau mendapatkan penghasilan. Penggunaan kata ‘pekerja’ dalam akronim PSK sendiri juga menguatkan stigma atau label di atas. Kata “pekerja” memperlihatkan bahwa wanita-wanita tersebut melakukan kegiatan untuk mencari nafkah. Sehingga, ada kesadaran dalam diri individu, untuk menjadi pekerja seks komersial, karena ia menerima upah atas hasil kerjanya tersebut.

Gambar atau visual (*visual images*) yang dipakai untuk mengiringi narasi pada topik ini, turut menonjolkan atau menekankan apa yang penting. Dalam hal ini, sikap tidak setuju PSK dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan akan jaminan kehidupan ekonomi mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lokalisasi merupakan tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan ekonomi bagi para warga yang tinggal di dalamnya. Kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lokalisasi melibatkan usaha komersial atau perdagangan, yaitu proses jual beli barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Penggambaran secara negatif PSK yang pertama muncul dalam bentuk keadaan, yang menunjuk pada sesuatu yang telah terjadi, dan hanya menggambarkan keadaan tanpa harus menyebut dan bisa menyembunyikan subjek pelaku tindakan. Perangkat pembingkai menunjukkan bagaimana media mengonstruksi citra PSK sebagai pekerja kelas bawah. Dalam teks ini, terdapat kata yang mengarahkan khalayak pada citra tersebut (*depiction*). Hal ini muncul dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bunga berikut ini :

*Apa menjamin menerima **orang-orang seperti kita** ini semudah itukah mencari pekerja di tempat lain. Kalau penghasilan namanya orang seperti kita ini **penghibur** bukan pns ya ga tentulah lah mbak*

Penggunaan kata ‘orang-orang seperti kita’ dalam pernyataan di atas, menunjukkan bahwa PSK sendiri menyetujui stigma yang ada di masyarakat. Stigma yang selama ini muncul di masyarakat adalah stigma negatif karena melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, Bunga juga melabeli dirinya sebagai penghibur, yang bekerja untuk menyenangkan dan menyejukkan hati dari pembeli jasanya. Wanita penghibur adalah eufemisme atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan, dari kata pelacur, yaitu perempuan yang menjual diri.

Untuk memperjelas citra mengenai PSK sebagai pekerja kelas rendah, maka digunakanlah contoh (*exemplar*) sebagai perbandingan. Dalam teks ini, yang digunakan sebagai pembanding adalah PNS atau pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah, berada di luar politik, serta bertugas menjalankan administrasi

pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa PSK tidak sebanding bila disejajarkan dengan PNS, termasuk mengenai penghasilan perbulan.

Berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 2014, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS, serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas, yang meliputi tunjangan kinerja (dibayarkan sesuai pencapaian kinerja) dan tunjangan kemahalan (dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga di daerah masing-masing). Di luar gaji dan tunjangan, PNS juga diberi fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Melihat penjelasan di atas, maka pekerjaan sebagai ‘wanita penghibur’ atau pelacur, tidak setara jika dibandingkan dengan PNS. PNS diibaratkan sebagai ‘pekerja kelas atas’, sementara PSK adalah ‘pekerja kelas bawah’.

Perbandingan dengan PNS ini kemudian semakin menguatkan citra PSK tersebut. Selain itu, gambar (*visual images*) yang ditampilkan juga turut membentuk citra ‘pekerja kelas bawah’ ini. Seperti pada saat presenter menanyakan besar penghasilan yang diterima oleh PSK, gambar yang ditampilkan adalah para PSK yang sedang duduk di sofa menunggu tamu. Hal ini menekankan pekerjaan PSK sebagai penghibur dengan stigma negatif yang selama ini berkembang di masyarakat. Gambaran ini pada akhirnya juga mendukung gagasan mengenai stigma negatif terhadap PSK, yang akan mempersulit dalam mencari pekerjaan.

Pemberian sebuah stigmatisasi (*depiction*) yang lain terhadap warga di lokasi juga muncul dalam penggunaan kata ‘rakyat kecil’ dalam kalimat yang disampaikan oleh Thamrin berikut ini :

Jadi pemerintah harus menjaga apa kesatuan publik dengan mengoperasi itu. Nah, ini rakyat kecil di Dolly ditutup habis lah kehidupan mereka itu kehidupan berpuluh tahun. Jaringan sosial berpuluh tahun hancur dalam satu malam itu saya kira (baris 104-110).

Definisi ‘rakyat kecil’ merujuk pada orang yang tingkat sosial ekonominya sangat rendah. Dengan demikian Thamrin melihat bahwa warga yang berada di lokasi merupakan individu-individu yang tingkat sosial maupun ekonominya rendah, sehingga perlu diselamatkan. Rakyat kecil ini merupakan orang kebanyakan, yang tidak mempunyai kekuasaan.

Sementara itu, bingkai negatif lain mengenai PSK muncul dalam bentuk tindakan, seperti dalam kalimat berikut ini “Nah bahwa pemerintah kota Surabaya sudah melakukan pelatihan ya. Kemudian sebagian tidak ikut. Ya itu memang ada yang mau ada yang tidak mau tapi semua diberi kesempatan yang sama”. PSK sebagai subjek, digambarkan tidak mau mengikuti (kata kerja) pelatihan (objek) yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Rangkaian kalimat ini memperjelas bagaimana representasi PSK yang dibentuk secara negatif oleh media melalui pernyataan narasumber.

Dari analisis di atas, terlihat bahwa pembingkai dalam teks, hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas di lokalisasi dibentuk sebagai sebuah proses mental berupa fenomena. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan PSK umumnya berbentuk keadaan. Namun jika hal tersebut negatif, maka bentuknya adalah tindakan. Hal-hal yang terkait dengan pemerintah kota, baik yang sifatnya negatif maupun positif, dibentuk dalam struktur tindakan. Dengan demikian, terlihat bahwa PSK tidak mendapatkan posisi yang tinggi di dalam teks, karena PSK umumnya tidak digambarkan sebagai partisipan dalam proses. PSK hanya digambarkan sebagai *patient* atau individu yang terpengaruh oleh *action*. Sebaliknya, pemerintah selalu digambarkan sebagai aktor (*actor*) dalam peristiwa (*event process*) penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak tersebut.

Elemen dasar kedua dalam analisis teks adalah **relasi**, yaitu bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Media di sini dipandang sebagai arena sosial, di mana semua kelompok, golongan, dan khalayak yang ada di masyarakat, saling berhubungan, dan menyampaikan versi pendapat dan gagasannya (Eriyanto, 2001, p. 300). Sementara elemen dasar ketiga adalah **identitas**, yaitu bagaimana identitas wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks pemberitaan. Menurut Fairclough, yang menarik adalah bagaimana wartawan menempatkan dan mengidentifikasi dirinya dengan masalah atau kelompok sosial yang terlibat, akankah sebagai bagian dari khalayak, atau sebagai dirinya sendiri secara mandiri (Eriyanto, 2001, p. 304).

Meskipun dalam analisis akan memudahkan untuk memisahkan pembahasan mengenai relasi dan identitas, namun dalam praktik, keduanya tidak dapat dipisahkan. Bagaimana identitas reporter dikonstruksi akan menentukan bagaimana relasi yang terbentuk dengan partisipan yang lain. Dengan demikian, maka dalam penjelasan berikut, peneliti tidak akan memisahkan secara kaku, antara relasi dan identitas.

Menurut Fairclough, paling tidak ada tiga kategori partisipan utama dalam media, yaitu (1) reporter (dalam hal ini yang dimaksud adalah semua kategori dari pekerja media, termasuk

penyiar, presenter, pembaca berita, dsb); (2) audiens atau khalayak; dan (3) bermacam-macam kategori partisipan lain, biasanya berasal dari domain publik (seperti politisi, pemuka agama, ilmuwan, dan sebagainya) (Fairclough, 1995, p.125). Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan hubungan antara presenter dengan PSK.

Dalam hubungan yang ini, tampak relasi yang tidak setara. Hal ini disebabkan karena presenter cenderung hanya melakukan tanya jawab mengenai hal-hal yang sifatnya sangat sempit. Presenter juga tidak memberi kesempatan pada PSK untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh narasumber yang lain. Hal ini terlihat dalam pertanyaan yang disampaikan oleh presenter berikut :

Ibu Bunga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini merupakan salah satu pekerja yang ada di gang Dolly. Ibu tidak setuju dengan penutupan ini. Kenapa Ibu tidak setuju?

Pertanyaan ini muncul pada segmen pertama, setelah terjadi dialog antara Andini dengan Thamrin, mengenai dampak sosial yang muncul akibat penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak. Tidak adanya keterkaitan antara pertanyaan terhadap Bunga, dengan dialog antara Andini dan Thamrin sebelumnya, menunjukkan bahwa presenter tidak memberikan kesempatan bagi PSK untuk memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Hal ini menunjukkan seakan-akan PSK tidak memiliki kemampuan atau kecakapan untuk membicarakan topik yang sama.

Selanjutnya pada segmen kedua, presenter mengajukan pertanyaan berikut ini:

Kita langsung saja ke Ibu Bunga. Ibu Bunga, tadi sudah mendengar dari pemkot Surabaya sendiri mengatakan dari Ibu Risma, bahwa tidak perlu khawatir, sudah dipersiapkan akan ada pelatihan kerja, bantuan modal usaha. Menurut Ibu sendiri, apakah ini cukup? Apa yang bisa dilakukan lebih lagi dari pemkot?

Jika kita melihat pertanyaan yang diajukan oleh Andini, nampak bahwa relasi yang muncul sudah nampak setara, karena presenter memberikan kesempatan bagi Bunga untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah kota Surabaya, mengenai pelatihan dan bantuan modal usaha bagi para modal usaha. Namun pada kenyataannya, relasi yang muncul tetapih tidak setara, karena presenter telah memberikan penilaian awal atas sikap yang diberikan oleh PSK. Presenter mengidentifikasi PSK adalah pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, dan menilai bahwa bantuan yang diberikan tidaklah layak bagi PSK. Pertanyaan ini sebenarnya membentuk dan mengarahkan

penyataan yang akan diberikan oleh PSK ke arah yang negatif. Presenter tidak melihat Bunga sebagai individu merdeka yang berhak menyampaikan pandangan bebasnya mengenai kebijakan pemerintah tersebut.

Selain temuan-temuan di atas, relasi yang tidak setara ini juga ditandai dengan kecilnya porsi yang diberikan oleh media kepada Bunga. Seperti pada segmen ketiga, Bunga sama sekali tidak mendapatkan waktu untuk memberikan tanggapan atau pernyataan apapun. Padahal, pada sebuah dialog, segmen terakhir adalah segmen paling penting, dimana pada saat itulah, tiap narasumber memberikan pernyataan sebagai penilaian atau kesimpulan akhir dari dialog yang sudah berlangsung sejak awal. Terlebih lagi, pada segmen ketiga ini, banyak disinggung oleh pemerintah mengenai sikap tidak konsisten PSK terhadap kegiatan-kegiatan, baik sosialisasi maupun pelatihan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota.

Berbeda dengan relasi sebelumnya, di mana Gus Ipul sebagai perwakilan pemerintah kota dan Provinsi dapat ‘membela diri’ saat mendapat penilaian negatif dari narasumber yang lain, maka tidak demikian yang terjadi pada Bunga, sebagai perwakilan PSK di lokasi Dolly dan Jarak. Bunga tidak diberi kesempatan yang sama untuk ‘membela diri’, saat mendapat penilaian yang negatif dari narasumber lain. Hal ini disebabkan karena presenter mengidentifikasi dirinya hanya sebagai presenter profesional yang bertugas untuk mewawancarai PSK sebagai narasumber, namun tidak menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi dari informasi yang disampaikan oleh PSK tersebut, bagi khalayak. Dengan kata lain, PSK diidentifikasi hanya sebagai pihak ‘korban’ yang harus hadir untuk didengar ceritanya (bukan tanggapan atau pemikirannya).

Dengan kata lain, melihat pada beberapa relasi yang tercipta, presenter *Primetime News* Metro TV dalam dialog mengenai penutupan lokasi Dolly dan Jarak ini cenderung memberikan posisi yang lebih tinggi pada partisipan yang berasal dari pemerintahan. Sementara tokoh sosial lain yang berasal dari kalangan ilmuwan (atau akademisi, seperti sosiolog), diperlakukan dalam posisi yang setara sesuai pandangan profesional. Sedangkan PSK, diletakkan dalam posisi yang tidak setara, atau lebih rendah.

Diskusi

Primetime News, program *talk show* di Metro TV ini, dibuat atas tujuan untuk menghadirkan sebuah tayangan yang tidak hanya sekedar dialog. Dalam *Primetime News*, dua sampai tiga isu dikupas dan dibahas secara menyeluruh dan mendalam melalui sebuah penelusuran dan dialog. Penelusuran ini dilakukan agar khalayak mendapatkan gambaran

yang utuh tentang suatu isu. Sementara itu, dialog yang dipandu oleh seorang *news anchor* dan melibatkan beberapa narasumber, berfungsi sebagai alat untuk *cross check* atau mengecek kebenaran isu-isu tersebut. Tidak seperti *talk show* lain yang berbentuk *talking head*, atau sekedar berbicara saja, *Primetime News* berusaha menggali konteks dari tiap isu yang diangkat dan dibicarakan. Dengan demikian, isu tersebut tidak menjadi hal yang dangkal, atau sekedar dibicarakan di permukaannya saja.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Jurgen Habermas, dimana ruang publik Ruang publik terbentuk di antara masyarakat sipil dan negara, sebagai tempat diskusi publik kritis mengenai persoalan kepentingan umum, yang dilindungi secara institusional (Habermas, 2012, p.viii-ix). Meski demikian, sama seperti halnya media massa lain sebagai medium presentasi ruang publik, *Primetime News* juga tidak netral, karena pada kenyataannya dikendalikan oleh para aktor media massa. Mereka mengontrol media massa dengan menduduki akses-akses untuk menseleksi tema, informasi, dan kontribusi.

Hal ini terlihat dalam hasil analisis wacana kritis yang telah diuraikan secara lengkap. Melalui dimensi pertama, analisis teks, ditemukan bahwa akses yang diberikan kepada tiap pihak yang terlibat dalam pentupan lokalisasi Dolly dan Jarak ternyata tidak sama. Bentuk representasi yang tercipta, menunjukkan ketimpangan akses ini. Contoh yang terlihat dengan jelas adalah bagaimana pelacur, sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat, direpresentasikan secara negatif sebagai pekerja kelas bawah yang hanya mencari keuntungan secara ekonomi, dan tidak memberikan komitmen penuh untuk mengikuti sosialisasi maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Representasi di atas tidak sejalan dengan konsep ruang publik sebagai tempat dimana masyarakat dapat mendeliberasikan kepentingan politisnya dan mencoba untuk menentukan tindakan yang tepat untuk kebaikan bersama atas masalah-masalah sosial, seinklusif dan seluas mungkin, termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kelompok minoritas.

Dengan demikian, ruang publik sebagai media terbentuknya demokrasi pun, juga tidak akan terwujud. Ignasius Wibowo menyebutkan bahwa negara tidak akan menjadi demokratis bila di dalamnya ada satu kutub yang terdiri atas kelompok superkaya, kelompok penikmat privilese, dan kutub lain yang terdiri atas kelompok minoritas yang tersingkirkan, kelompok orang miskin yang terpinggirkan (2011, p.73-74).

Relasi yang terbentuk antara media dengan pihak lain juga menunjukkan adanya ketimpangan akses ini. Dalam dialog mengenai pentupan lokalisasi Dolly dan Jarak ini, ditemukan bahwa relasi antara media dengan pemerintah cenderung tidak setara, dimana

pemerintah berada dalam posisi di atas presenter, sebagai perwakilan media. Relasi yang tidak setara juga tercipta antara presenter dan pelacur. Namun, dalam hubungan ini, pelacur diposisikan ada di bawah presenter.

Pembentukan dan pembatasan akses-akses terhadap tema, informasi, dan distribusi ini dipengaruhi oleh beragam faktor. Hal ini dapat terlihat dalam dimensi kedua, yaitu praktik wacana. Pemilihan *genre* dan bentuk wawancara adalah faktor pertama yang menjadi alat pembatasan akses. Saat pemerintah ditempatkan sebagai penentu kebijakan, akademisi sebagai penjelas latar belakang masalah, pelacur hanya ditempatkan sebagai sosok personal yang hanya diwawancara untuk mendapatkan informasi mengenai perasaannya, tanpa mengaitkannya dengan proses pembentukan kebijakan.

Dalam proses demokrasi deliberatif atau pembentukan ruang publik ini sebagai konsesus yang beretika, Habermas merumuskan sebuah kondisi pembicaraan yang ideal (*ideal speech situation*), dimana tiga kebutuhan partisipan, yaitu kebutuhan akan akses, kebutuhan akan argumentasi, dan kebutuhan akan pembenaran, telah terpenuhi (Griffin, 2011, p.243). Dalam *Primetime News* kondisi ideal ini berusaha diwujudkan, dengan menghadirkan narasumber yang terkait dalam penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, untuk berdiskusi bersama dalam sebuah dialog langsung. Terdapat upaya untuk memberikan akses bagi semua pihak, untuk datang dan didengarkan, terlepas dari apapun status mereka. Selain itu juga muncul usaha untuk merumuskan tindakan yang tepat bagi kepentingan bersama terkait realitas sosial tersebut.

Meski demikian, upaya untuk membicarakan kepentingan kaum marginal, dalam hal ini pelacur, tidak mendapatkan porsi utama. Akses memang terbuka bagi mereka untuk bersuara, namun media tetap membatasi besarnya. Padahal, seharusnya aktor *autokhon* ruang publik mempunyai sensibilitas untuk hal-hal yang mengancam hak-hak komunikasi, dan memiliki kemauan untuk melawan bentuk-bentuk eksklusivitas maupun represi terhadap kelompok minoritas marginal.

Kesimpulan

Ada beberapa hal penting yang bisa disimpulkan dalam penelitian ini. *Pertama*, dalam mengonstruksi realitas sosial penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya, Metro TV melalui program *talk show*nya *Primetime News*, merepresentasikan keberadaan lokalisasi sebagai hal yang lumrah ada di masyarakat, dan penutupan lokalisasi hanya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, antara lain memperparah penyebaran penyakit seksual

menular dan menghancurkan kehidupan PSK secara ekonomi. Di sisi lain, *talk show* tersebut menggambarkan pelacur secara negatif sebagai pekerja kelas bawah yang hanya mencari keuntungan secara ekonomi, dan tidak memberikan komitmen penuh untuk mengikuti sosialisasi maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah. *Kedua*, terdapat hubungan yang tidak setara antara presenter dan pelacur. Hal ini terjadi saat presenter mengidentifikasi dirinya hanya sebagai presenter profesional yang bertugas untuk mewawancarai pelacur sebagai narasumber, namun tidak menunjukkan tingkat kepentingan yang tinggi dari informasi yang disampaikan oleh pelacur tersebut, bagi khalayak. *Ketiga*, wacana media dalam penelitian ini terbentuk melalui beberapa jenis wawancara. Presenter menggunakan jenis *The Experiential/Witness Interview* dalam mewawancarai pelacur, sebagai sosok personal yang terkait langsung dalam peristiwa penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media belum memberikan kontribusi bagi terciptanya pencerahan dan perubahan bagi masyarakat untuk bisa kembali berpikir praktis terhadap realitas-realitas sosial yang ada di sekitarnya, terutama yang memiliki potensi konflik. Tidak adanya akses bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam diskusi yang membahas isu-isu sosial, menunjukkan bahwa ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah interaksi kritis, belum terwujud. Komunikasi antar warga yang terbatas ini kemudian memperlemah kohesivitas sosial di dalam masyarakat. Dengan kata lain, toleransi yang muncul hanyalah bersifat pasif. Akibatnya, terbentuk empati dan kepedulian yang semakin rendah terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan, terutama yang terkait dengan minoritas. Melalui hasil penelitian ini, terlihat bahwa media massa dapat memainkan perannya sebagai mediator atau penengah dalam konflik. Media massa dapat membuka peluang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk terlibat dalam kegiatan media yang menjadi tempat dan jembatan bagi interaksi masyarakat, melalui program-program tayangannya, misalnya *talk show*. Dengan demikian, dalam penanganan realitas sosial yang berpotensi menimbulkan konflik di Indonesia, pemerintah ataupun pihak lain yang terkait, dapat memanfaatkan keberadaan media sebagai ruang publik, tempat dialog atau diskursus bagi semua pihak yang terlibat, untuk membahas dan menentukan kebijakan-kebijakan yang meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik, serta bernilai positif bagi terwujudnya perdamaian di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Berger, Peter L., & Thomas Luckmann. (1991). *The Social Construction of Reality : A Treatise in The Sociology of Knowledge*. USA : Penguin Books.
- Bungin, Burhan. (2007). *Konstruksi Sosial Media Massa : Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Curran, James, & Gurrevitch, Michael. (1991). *Mass Media and Society*. London : Edward Arnold.
- Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln. (2005). *Handbook of Qualitative Research (3rd edition)*. Unites States of America : Sage.
- Endraswara, Suwardi. (2006). *Metode Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta
- Fairclough, Norman (1995). *Critical Discourse Analysis*. Boston : Addison Wesley.
- Griffin, EM. (2011). *A First Look at Communication Theory (8th edition)*. New York : McGraw-Hill.
- Habermas, Jurgen. (2012). *Ruang Publik : Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Bantul : Kreasi Wacana.
- Hallgrimsdottir, Helga Krsitin, Rachel Phillips & Cecilia Benoit. (2006, August). *Fallen Women and Rescued Girls : Social Stigma and Media Narratives of the Sex Industry in Victoria, B.C., from 1980 to 2005*. The Canadian Review of Sociology and Anthropology. Vol 43 no.3. p.265.
- Hardiman, F. Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatof : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta : Kanisius.
- Haryanto. (2009). *Gender dalam Konstruksi Media*. Komunika : Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto. Vol.3 No.2 Juli-Desember 2009. p.167-183.
- Haryatmoko. (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara
- Ibrahim, Idi Subandy, & Suranto, Hanif (Eds.). (1998). *Wanita dan Media : Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartono, Kartini. (2014). *Patologi Sosial (Jilid I)*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Jamal, Cemi Fitriani. (2013). *Politik Prostitusi Kota Surabaya (Studi Deskriptif : Eksistensi Dolly)*. Jurnal Politik Muda, Universitas Airlangga. Vol 2 no.1.
- Nakayama, Thomas K, and Martin, Judith N. (2007). *Intercultural Communication in Contexts (4th Edition)*. New York : McGraw Hill.
- Shoemaker, Pamela J., & Stephen D. Reese. (1996). *Mediating the Message : Theories of Influences on Mass Media Content (Second Edition)*. USA : Longman Publisher.
- Tjahjo, Purnomo & Ashadi Siregar. (1983). *Dolly : Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Jakarta : Grafiti Pers
- Wibowo, I. (2011). *Negara dan Bandit Demokrasi*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.